



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCH. MUCHLISIN
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 262591

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.004.000.000

1. Tanah Seluas 5.600 m2 di KAB / KOTA LAMONGAN, Rp. 367.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 940.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 490.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 511.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HADIAH Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	69.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	44.688.352
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.629.188.352
III. HUTANG	Rp.	460.335.382
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.168.852.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.